DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Abdi. 2021. Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Timur. PhD Thesis. Universitas Islam Riau.
- Ahmadi, Abu Dan Narbuko, Cholid. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Angela, Ayu, Wilma dan Aprina, Nugrahesthy, Sulistya, Hapsari. 2019. *Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar*.
- Anggraini, Jum. 2012. hukum administrasi negara. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arif, Muhamad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. PekanBaru: ReD Press.
- Bangun, Arti Kurniaty, Rahma, Dewi, dan Sanusi, Hasibuan. 2019. Manajemen Pembinaan Atlet Shorinji Kempo Pengprov Sumatera Utara.
- Desi, Indralia. 2017. Peranan Dakwah Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al Lathifiyyah. Skripsi.
- Dona, Rima, Fitria. 2012. Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. Skripsi.
- Elianata, Elianata, dan Budi, Setiawati. 2021. Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Desa Biwan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.
- Estiningsih, Muji. 2015. Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa). Yogyakarta. Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.
- Evi, Martha dan Sudarti, Kresno. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidan Kesehatan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fardhan, Patingki. 2017. Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Skripsi.
- Gunawan, Kepala Camat Dukun, wawancara pada tanggal 23 desember 2024
- Heriyanto, Anas. 2019. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta. Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial. 2009. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada Pres).

- Jhandi, Suwinli, Liju. 2017. pengawasan camat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dana belanja desa. Jurnal Administrasi Publik.
- Kalsen, Hans. 2009. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung. Nusamedia.
- Kurniawan, Iwan, dan Widjaya. 2012. Enterprise Resource Palnning. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Latif, Abdul. 2007. Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi. Yogyakarta: Total Media.
- Leo, kepala desa, wawancara pada tanggal 17 Desember 2024
- Levinson. 1952. Role Personality And Social Structure. Dalam Soerjono Soekanto. 1952. Sosiologi Suatu Pengantar.
- Malasari, Putri. 2013. Manajemen Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Pekanbaru.
- Mia, Bendahara desa, wawancara pada tanggal 17 Desember 2024
- Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nurman. 2015. Strategi Dalam Pembangunan Daerah Edisi Revisi. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada.
- Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 19 Ayat 1 Dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 4 Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Paulus K. Nggaa. 2022. Peran Camat Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Journal Of Social And Policy Issue.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4Ayat 1 Dan 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4 Ayat (1) Dan (2).
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, pasal 4 ayat (1) dan (2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 *Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 6 Ayat (1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 *Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ramli, Ashar, Muhamad, Ilima, Fitria, Azmi. 2023. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan PermusyawaratanDesa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*", Jurnal Good Governance.
- Rita, Mariyana, Ali, Nugroho, dan Rachmawati Yeni. 2010. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Rita, Zaharah, Efa, Rodiah, Nur dan Santoso, Rudi. 2023. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Santoso, Rudi. 2021. *Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law.
- Saparin. 1972. Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa.
- Sapitri, Hardi. 2019. Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tesis.
- Sarlito, Wirawan, Sarwono. 2007. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Smith, Philip M. 1985. Language the sexes and society. Oxford: Blackwell.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, Hal 212, 2014.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods. Bandung: Alfabeta.
- Supri, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2024
- Suwito, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2024
- Ternando, Melky. 2018. Peranan Camat Dalam Mengawasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Diss Universitas Islam Riau.
- Tubagus, Muhamad, Aiyon dan Ratu, Adhillah. 2023. *Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat DaerahKabupaten Lampung Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung Selatan. Uin Raden Itan Lampung.
- Waro, BPD madumulyorejo, wawancara pada tanggal 15 januari 2025
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 8 – 11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat (1-2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 Ayat (1) Hal 36.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 216 Ayat 2.